BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL
Subyek : Hari Bumi
Edisi : 18 APRIL 2008
Hari : JUMAT
Hal. : 10

MENGHIJAUKAN KOTA BUMI

Tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi Sedunia (*Earth Day*). Peringatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengingatkan (terus-menerus) nasib bumi yang tengah sekarat. Bagi Indonesia, peringatan Hari Bumi Sedunia sangatlah relevan untuk mengintrospeksi diri terhadap berbagai bencana yang datang silih berganti menghampiri kota-kota kita. Di musim hujan, bencana tanah longsor, banjir, rob, dan abrasi pantai telah melumpuhkan akivitas kehidupan kota.

Kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) selalu menjadi tumpahan kekesalan warga dan tumbal ketidakbecusan pemerintah daerah dalam mengelola aset kota. Di musim kemarau, krisis air bersih, pencemaran air, kebakaran, kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara menghantui warga kota. Isu pemanasan global, perubahan iklim secara ekstrem dan degradasi kualitas lingkungan telah menyadarkan sebagian pihak untuk menyelamatkan lingkungan hidup kota dan kita, sekaligus menjaga kelestarian bumi.

Tanpa Menggusur

Membangun kota tanpa menggusur adalah sebuah cita-cita luhur dalam mewujudkan kota yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ironisnya, di tengah keterbatasan lahan kota, konsumtivisme ruang kota terhadap pembangunan infrastruktur kota (jalan tol layang, pelebaran jalan), permukiman (hotel, apartemen), dan pusat perbelanjaan (mal, plasa, hipermarket) terus menggerogoti RTH, daerah resapan air dan paru-paru kota kita.

Keintiman di ruang khalayak di ruang-ruang publik sudah lama mati (suri) dan ditinggalkan warga beralih ke dalam pusat-pusat perbelanjaan (mal, plasa, hipermarket, *town square*) yang mengepung kota metropolitan. Kekurangan ruang khalayak telah mempermudah dan memberi peluang untuk kekerasan bentrok fisik (tawuran anak sekolah atau antarkampung, demonstrasi anarkis). Di ruang terbuka, kita berkarya (berbuat demi keuntungan orang banyak), ruang kolektif, dan aksesibel. Kita bertemu, berdialog, berbicara, berjalan, berlari, bersepeda, dan berpartisipasi dalam budaya yang sama.

Privatisasi ruang publik telah menciptakan pertemuan publik di ruang komersial milik pribadi, mal atau taman hiburan, menyaring orang yang masuk (orang miskin dilarang masuk). Publik merindukan ruang publik semacam alun-alun (ruang publik asli Indonesia) yang mewadahi interaksi berbagai lapisan sosial masyarakat, budaya, dan agama yang mampu menumbuhkan empati. Pemerintah wajib mempertahankan makna ruang publik, bukan malah gencar menghabisi ruang publik. Modalitas produksi RTH harus menyemai keragaman, rasa memiliki oleh masyarakat, dan memberdayakan masyarakat berpartisipasi aktif melalui kerja bersama (bukan kerja sama) kreatif (*creative collaboration*) antara pengelola, perencana, pengembang, pendidik dan warga kota.

Kerja bersama kreatif membagi peran dan beban, membangun rasa memiliki terhadap ruang terbuka yang di sekitarnya, dan menyesuaikan RTH makin mengena kepada kebutuhan masyarakat. Pembangunan kota yang terlalu berorientasi pasar mengakibatkan daya guna lahan tidak efisien dan kekurangan bank lahan bagi pemerintah. Infrastruktur transportasi publik tidak optimal. Keterbatasan lahan dan harga tanah yang sangat mahal membuat penerapan konsep pembangunan permukiman berdensitas rendah sudah tidak relevan. Sementara pemerintah masih mengalami resistensi budaya masyarakat kota untuk tinggal di bangunan bertingkat tinggi. Masalah kerusakan lingkungan dan kekurangan ruang hijau kota mengundang bencana terus terjadi setiap saat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sesuai UU No 23/1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, peningkatan kualitas kehidupan segenap lapisan warga harus menjadi acuan dan landasan utama dalam pembangunan kota. Pembangunan kota yang berkelanjutan harus mencakup keseimbangan ekologis, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, pelibatan swasta, kenyamanan warga, etika pembangunan, keadilan dan kesetaraan hak, konservasi energi, dan estetika kota.

Keberlanjutan lingkungan hidup manusia selain tergantung kepada perlindungan lingkungan alamiah dan upaya pemenuhan akan kebutuhan dasar, juga meliputi perencanaan lingkungan binaan dengan segala elemen pembentuknya (bangunan, ruang terbuka, norma estetika, dan warisan budaya). Upaya perubahan perbaikan kota ada pada semangat masyarakat itu sendiri untuk bangkit dan kemauan mereka untuk diajak menata kembali kehidupan berkota kita.

Pemerintah harus segera merefungsi jalur hijau bantaran kali, tepian rel kereta api, kolong jembatan dan jalan layang, saluran tegangan tinggi dari permukiman ilegal dengan bijaksana, manusiawi, dan komprehensif. Fakta keterbatasan lahan kota mendorong pemerintah menggeser (bukan menggusur) masyarakat untuk (sukarela) tinggal di rumah susun sederhana milik (rusunami) yang sehat, layak huni, dan di sekitar pusat kota. Tujuannya mengurangi beban transportasi (cukup berjalan kaki, bersepeda, angkutan umum pulang pergi sekali). Penggusuran tanpa solusi komprehensif hanya memperburuk sistem perkotaan secara keseluruhan karena kaum tergusur akan kembali bermukim kawasan hijau di lain lokasi.

Pada era pemanasan bumi dan berbagai bencana alam (banjir, tanah longsor, pencemaran udara, krisis air), gerakan penanaman pohon besar yang lebih banyak lagi merupakan hal mutlak. Pohon berjasa menahan air dalam tanah, mencegah erosi dan longsor, menjadi habitat bagi beragam mahluk hidup, memproduksi oksigen, menyerap karbondioksida - gas efek rumah kaca penyebab pemanasan bumi - menyaring gas polutan, meredam kebisingan, angin dan sinar matahari, dan menurunkan suhu kota. Seluruh warga kota hendaknya berpartisipasi menggerakkan lompatan besar menghijaukan kota melawan proses penggurunan kota (hutan beton).

Jika pembangunan kota semakin menjauh dari alam, maka fenomena bunuh diri ekologis dan bunuh diri perkotaan terasa semakin mendekat. Pengelola kota (pemerintah kota, wakil rakyat), perencana kota, dan pengembang kota harus menjaga keseimbangan alam, manusia, dan lingkungan binaan.

Arsitek Lansekap

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup